

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Tingkat Pendapat Asli Daerah, *Fiscal Stress* dan Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) tahun 2018. Data yang digunakan diperoleh dari *website* resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) (www.djpk.kemenkeu.go.id).

3.1.1 Gambaran Umum 34 Provinsi di Indonesia

1 Provinsi Aceh

Provinsi Aceh memiliki luas wilayah 57.956,00 km² dengan ibukota provinsi, Banda Aceh. Terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota dengan jumlah penduduk mencapai 5.281.300 jiwa.

2 Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara memiliki luas wilayah 72.981,23 km² dengan ibukota provinsi, Medan. Terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota dengan jumlah penduduk mencapai 14.415.400 jiwa.

3 Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah 42.012,89 km² dengan ibukota provinsi, Padang. Terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan jumlah penduduk mencapai 5.382.100 jiwa.

4 Provinsi Riau

Provinsi Riau memiliki luas wilayah 87.023,66 km² dengan ibukota provinsi, Pekanbaru. Terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk mencapai 6.814.900 jiwa.

5 Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 8.201,72 km² dengan ibukota provinsi, Tanjung Pinang. Terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk mencapai 2.136.500 jiwa.

6 Provinsi Jambi

Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 50.058,16 km² dengan ibukota provinsi, Jambi. Terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk mencapai 3.570.300 jiwa.

7 Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas wilayah 91.592,43 km² dengan ibukota provinsi, Palembang. Terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota dengan jumlah penduduk mencapai 8.370.300 jiwa.

8 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas wilayah 16.424,06 km² dengan ibukota provinsi, Pangkal Pinang. Terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk mencapai 1.459.900 jiwa.

9 Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah 19.919,33 km² dengan ibukota Provinsi, Bengkulu. Terdiri dari 9 kabupaten serta 1 kota dan jumlah penduduk

mencapai 1.963.300 jiwa.

10 Provinsi Lampung

Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 34.623,80 km² dengan ibukota provinsi, Bandar Lampung. Terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk mencapai 8.370.500 jiwa.

11 Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta memiliki luas wilayah 664,01 km² dengan ibukota provinsi, Jakarta. Terdiri dari 1 kabupaten dan 5 kota dengan jumlah penduduk mencapai 10.467.600 jiwa.

12 Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 35.377,76 km² dengan ibukota provinsi, Bandung. Terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota dengan jumlah penduduk mencapai 48.683.700 jiwa.

13 Provinsi Banten

Provinsi Banten memiliki luas wilayah 9.622,92 km² dengan ibukota provinsi, Serang. Terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota dengan jumlah penduduk mencapai 12.689.700 jiwa.

14 Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,69 km² dengan ibukota provinsi, Semarang. Terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan jumlah penduduk mencapai 34.490.800 jiwa.

15 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.133,15 km² dan ibukota

provinsi, Yogyakarta. Terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk mencapai 3.802.900 jiwa.

16 Provinsi Jawa timur

Provinsi Jawa timur memiliki luas wilayah 47.799,75 km² dengan ibukota provinsi, Surabaya. Terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan jumlah penduduk mencapai 39.500.900 jiwa.

17 Provinsi Bali

Provinsi Bali memiliki luas wilayah 5.780,06 km² dengan ibukota provinsi, Denpasar. Terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk mencapai 4.292.200 jiwa.

18 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki luas wilayah 18.572,32 km² dengan ibukota provinsi, Mataram. Terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk mencapai 4.292.200 jiwa.

19 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas wilayah 48.718,10 km² dengan ibukota provinsi, Kupang. Terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk mencapai 5.371.500 jiwa.

20 Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah 75.467,70 km² dengan ibukota provinsi, Tanjung Selor. Terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk mencapai 716.400 jiwa.

21 Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 147.307,00 km² dengan ibukota provinsi, Pontianak. Terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk mencapai 5.001.700 jiwa.

22 Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah 153.564,50 km² dengan ibukota provinsi, Palangka Raya. Terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk mencapai 2.660.200 jiwa.

23 Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas wilayah 38.744,23 km² dengan ibukota provinsi, Banjarmasin. Terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk mencapai 4.182.700 jiwa.

24 Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 129.066,64 km² dengan ibukota provinsi, Samarinda. Terdiri dari 7 kabupaten dan 3 kota dengan jumlah penduduk mencapai 3.648.800 jiwa.

25 Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas wilayah 13.851,64 km² dengan ibukota provinsi, Manado. Terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota dengan jumlah penduduk mencapai 2.484.400 jiwa.

26 Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat memiliki luas 16.787,18 km² dengan ibukota provinsi, Mamuju. Terdiri dari 6 kabupaten dan jumlah penduduk 1.355.600 jiwa.

27 Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah 61.841,29 km² dengan ibukota provinsi, Palu. Terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk mencapai 3.010.400 jiwa.

28 Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki luas wilayah 38.067,70 km² dengan ibukota provinsi, Kendari. Terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk mencapai 2.653.700 jiwa.

29 Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah 46.717,48 km² dengan ibukota provinsi, Makassar. Terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota dengan jumlah penduduk mencapai 8.772.000 jiwa.

30 Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 11.257,07 km² dengan ibukota provinsi, Gorontalo. Terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk mencapai 1.185.500 jiwa.

31 Provinsi Maluku

Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 46.914,03 km² dengan ibukota provinsi, Ambon. Terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk mencapai 1.773.800 jiwa.

32 Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara memiliki luas wilayah 31.982,50 km² dengan ibukota provinsi, Ternate. Terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk

mencapai 1.232.600 jiwa.

33 Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat memiliki luas wilayah 102.955,15 km² dengan ibukota provinsi Manokwari. Terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk mencapai 937.500 jiwa.

34 Provinsi Papua

Provinsi Papua memiliki luas wilayah 319.036,05 km² dengan ibukota provinsi Jayapura Terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk mencapai 3.322.500 jiwa.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Nasution (2011:1) merupakan metode dimana hipotesis yang dirumuskan setelah dikumpulkan data objektif secara sistematis, akan diuji secara empiris.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survei. Metode deskriptif menurut Siregar (2013:16) adalah metode penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survei dan studi perkembangan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, karena data penelitian yang digunakan berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. (Sugiono, 2017:7)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *cross section*, dimana menurut Effendi dan Setiawan (2014:8) data *cross section* merupakan data berbagai individu dari variabel yang diamati yang dikumpulkan dalam satu waktu.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Sugiyono (2017:38) menjelaskan bahwa variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penenliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel yang sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Tingkat Pendapatan Asli daerah terhadap *Fiscal Stress* melalui Kemandirian Keuangan Daerah sebagai Variabel Intervening”. Adapun ketiga variabel tersebut didefinisikan sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Siyoto dan Sodik (2015:52). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Tingkat Pendapatan Asli Daerah, yang diukur dengan indikator pertumbuhan PAD. Menurut Halim (2004:163) pertumbuhan PAD menunjukkan kemampuan daerah mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang dicapainya dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga diketahui persentase peningkatan ataupun penurunannya.

Pertumbuhan PAD dirumuskan sebagai berikut:

$$G = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan

G = pertumbuhan PAD

PAD t = jumlah PAD tahun tertentu

PAD t-1 = jumlah PAD tahun sebelumnya

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Sugiyono (2017:39) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Fiscal Stress* dengan menggunakan indikator Upaya Pajak. Menurut Budi dan Priyo dalam Munafe et.al (2018:127) Upaya pajak adalah upaya peningkatan pajak daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki.

Sehingga menurut Sukanto (1999) dalam Rinaldi & Nuryasman (2013::82) upaya fiskal dapat dirumuskan dengan :

$$UPPADj = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{potensi PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

UPPADj : upaya peningkatan PAD

Realisasi PAD : realisasi penerimaan sumber PAD

Potensi PAD : target penerimaan sumber PAD (yang dianggarkan APBD)

3. Variabel Intervening (Z)

Siregar (2013:19) mendefinisikan variabel intervening sebagai variabel yang menjadi media pada suatu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Lebih lanjut Sugiono (2017:39) menjelaskan bahwa variabel intervening menyebabkan variabel independen tidak langsung mempengaruhi

perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel Intervening dalam penelitian ini adalah Kemandirian Keuangan Daerah yang diukur melalui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Halim (2007:232) menjelaskan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, dan dapat diukur dengan rumus berikut ini:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{transfer pemerintah pusat dan pinjaman}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah penyajian operasionalisasi variabel untuk memudahkan memahami variabel yang akan digunakan dalam penelitian

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Tingkat Pendapatan Asli Daerah (X)	Tingkat Pendapatan Asli Daerah merujuk pada proporsi Pendapatan Asli Daerah dari total Pendapatan Daerah. Dimana Pendapatan Daerah dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Baihaqi (2011:252)	Pertumbuhan PAD $G = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$	Rasio
Fiscal Stress (Y)	Fiscal stress adalah tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian di daerahnya. Muryawan	Upaya Pajak $UPPAD_j = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{potensi PAD}} \times 100\%$	Rasio

	dan Sukarsa (2014) dalam Sibuea (2017:4)		
Kemandirian Keuangan Daerah (Z)	Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan keuangan daerah. (Halim, 2007)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah $= \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pemerintah pusat} + \text{pinjaman}} \times 100\%$	Rasio

1.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Menurut Sugiyono (2017:137) Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

3.2.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data keuangan yang bersumber dari APBD pada pemerintah provinsi di Indonesia baik anggaran maupun realisasinya yang diakses melalui situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Adapun data yang menunjang penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipublikasikan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
2. Data lain yang diperoleh dari sumber kepustakaan, jurnal keuangan daerah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti oleh penulis.

3.2.2.2 Populasi Sasaran

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. (Siyoto dan Sodik, 2015:63).

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia, sehingga total terdapat 34 provinsi. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan populasi penelitian.

Tabel 3.2
Populasi Penelitian

No	Nama Provinsi
1	Provinsi Aceh
2	Provinsi Sumatera Utara
3	Provinsi Sumatera Barat
4	Provinsi Riau
5	Provinsi Kepulauan Riau
6	Provinsi Jambi
7	Provinsi Sumatera Selatan
8	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9	Provinsi Bengkulu
10	Provinsi Lampung
11	Provinsi DKI Jakarta
12	Provinsi Jawa Barat
13	Provinsi Banten
14	Provinsi Jawa Tengah
15	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16	Provinsi Jawa Timur
17	Provinsi Bali
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur
20	Provinsi Kalimantan Utara

21	Provinsi Kalimantan Barat
22	Provinsi Kalimantan Tengah
23	Provinsi Kalimantan Selatan
24	Provinsi Kalimantan Timur
25	Provinsi Sulawesi Utara
26	Provinsi Sulawesi Barat
27	Provinsi Sulawesi Tengah
28	Provinsi Sulawesi Tenggara
29	Provinsi Sulawesi Selatan
30	Provinsi Gorontalo
31	Provinsi Maluku
32	Provinsi Maluku Utara
33	Provinsi Papua Barat
34	Provinsi Papua

Sumber : www.bps.go.id (data diolah)

3.2.2.3 Penentuan Sampel

(Siyoto dan Sodik, 2015:64) mengungkapkan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu, sehingga dapat mewakili populasinya.

Adapun metode sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penetapan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. (Siregar, 2015:60)

Purposive Sampling dipilih karena terdapat beberapa kriteria yang disyaratkan untuk sampel yang akan diteliti sebagai upaya meningkatkan objektivitas dalam penarikan kesimpulan.

Adapun kriteria penentuan sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Penentuan Sampel Penelitian

	Kriteria	Jumlah
a	Provinsi di Indonesia yang terdaftar secara resmi sebagai bagian dari Provinsi di Indonesia tahun 2018	34
b	Provinsi yang tidak menerima Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 2018	(4)
c	Provinsi yang bukan merupakan daerah dengan otonomi khusus tahun 2018	(1)
	Jumlah Provinsi yang sesuai kriteria pemilihan sampel	29

Sumber : www.bps.go.id (data diolah)

Berdasarkan kriteria penentuan sampel diatas, berikut ini adalah daftar provinsi sampel penelitian.

Tabel 3.4
Daftar Provinsi Sampel Penelitian

No	Nama Provinsi
1	Provinsi Sumatera Utara
2	Provinsi Sumatera Barat
3	Provinsi Riau
4	Provinsi Kepulauan Riau
5	Provinsi Jambi
6	Provinsi Sumatera Selatan
7	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8	Provinsi Bengkulu
9	Provinsi Lampung
10	Provinsi Jawa Barat
11	Provinsi Banten
12	Provinsi Jawa Tengah
13	Provinsi Jawa timur
14	Provinsi Bali
15	Provinsi Nusa Tenggara Barat
16	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17	Provinsi Kalimantan Utara
18	Provinsi Kalimantan Barat
19	Provinsi Kalimantan Tengah
20	Provinsi Kalimantan Selatan

21	Provinsi Kalimantan Timur
22	Provinsi Sulawesi Utara
23	Provinsi Sulawesi Barat
24	Provinsi Sulawesi Tengah
25	Provinsi Sulawesi Tenggara
26	Provinsi Sulawesi Selatan
27	Provinsi Gorontalo
28	Provinsi Maluku
29	Provinsi Maluku Utara

Sumber : www.bps.go.id (data diolah)

3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dengan cara melihat, membaca dan mencatat data-data maupun informasi keuangan daerah provinsi di Indonesia yang diperoleh dari www.djpk.kemenkeu.go.id.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal serta karya tulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, sehingga diharapkan akan menunjang dan memberikan masukan dalam penelitian ini.

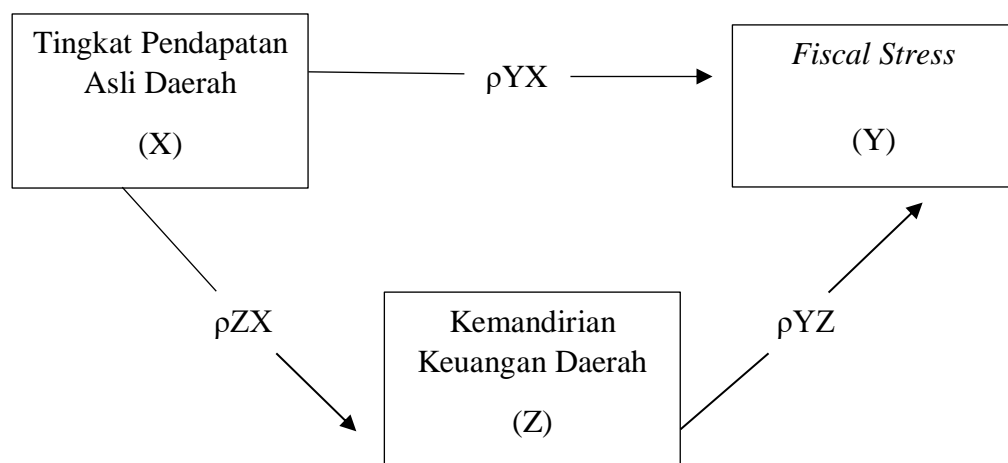
3.3 Paradigma Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:42) paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui

penelitian, teori yang digunakan untuk memutuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis yang digunakan.

Paradigma atau model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma jalur. Paradigma jalur digunakan karena terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antara atau disebut juga sebagai variabel intervening. Keberadaan variabel intervening ini akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah untuk mencapai sasaran akhir harus melewati variabel intervening atau dapat langsung ke sasaran akhir. (Sugiyono, 2017:46)

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka kerangka pemikiran yang diajukan penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2
Paradigma Penelitian

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. (Sugiyono, 2017:243)

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis Jalur (*Path Analysis*). Menurut Ghozali (2018:249) Analisis Jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

3.4.1. Statistik Deskriptif

Sarwono (2006:138) berpendapat bahwa Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan.

Menurut Sugiyono (2017:238) bahwa yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, *pictogram*, penghitungan *modus*, *median*, *mean*, perhitungan desil, persentil, penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi serta perhitungan presentase.

Namun yang akan dijelaskan dalam penelitian ini hanya nilai-nilai dasar berupa nilai *minimum*, *maximum* dan rata-rata.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalam model yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas dan heterokedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal.

Menurut Basuki dan Prawoto (2016) menjelaskan bahwa uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linear dengan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) meliputi Uji Linearitas, Autokorelasi, Heterokedastisitas, Multikolinearitas dan Normalitas.

Meski demikian tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada model regresi linear dengan model OLS, dimana uji linearitas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi linear karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linear. Sedangkan autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*, sehingga pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau data panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti. Oleh karena itu, pengujian asumsi klasik yang perlu dilakukan dalam penelitian ini hanya Normalitas, Multikolinearitas dan Heterokedastisitas.

Adapun langkah-langkah yang pengujian asumsi klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data berdistribusi normal atau tidak. (Siregar, 2013:153)

Siregar (2013:157) lebih lanjut menjelaskan bahwa pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik *Kolmogorov Smirnov* dengan taraf signifikan yang dilambangkan dengan $\alpha = 0,05$. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data sampel berdistribusi normal
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data sampel tidak berdistribusi normal

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Munfarida (2017:39) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan VIF 10.

- a. Jika nilai $VIF > 10$ maka didalam data tersebut terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Menurut Munfarida (2017:50) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ghozali (2013:139) juga menjelaskan jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Salahsatu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas menurut Ghozali (2013:142) adalah dengan melakukan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil Probabilitas dikatakan signifikan apabila nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%.

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dalam model regresi terdapat masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dalam model regresi tidak terdapat masalah hetesrokedastisitas.

3.4.3 Uji Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018:97) Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kebaikan suatu model, serta melihat kemampuan model untuk menerangkan seberapa besar variabel independen menerangkan variabel dependen. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung koefisien determinasi:

$$Kd = r^2 \times 10$$

Keterangan :

Kd : Koefisien determinasi

r^2 : Koefisien korelasi dikuadratkan`

Berikut ini adalah kriteria untuk menganalisis koefisien determinasi :

- a. Jika Kd mendekati nol, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen rendah.
- b. Jika Kd mendekati satu, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tinggi.

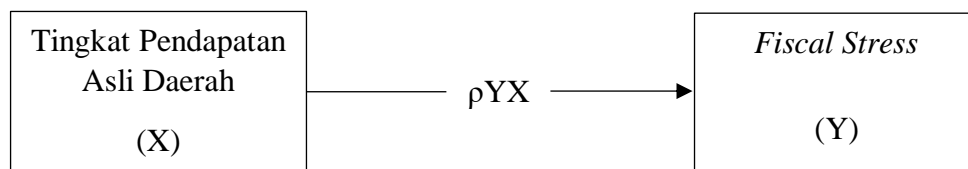
3.4.4 Analisis Jalur (Path Analysis)

Menurut Retherford (1993) dalam Sarwono (2011) path analysis adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi

berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat tidak hanya secara langsung tapi juga secara tidak langsung. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) karena terdapat variabel mediasi atau variabel intervening.

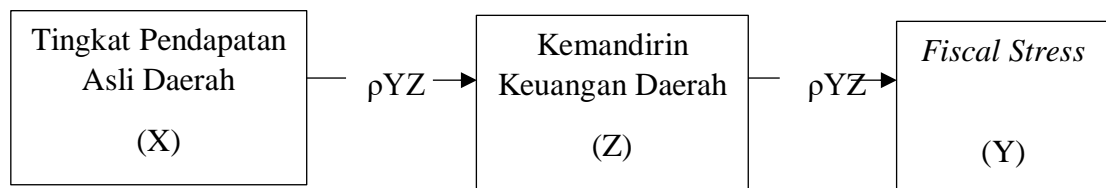
Struktur model dalam penelitian ini terbagi menjadi dua untuk menganalisis hubungan langsung variabel X terhadap Y dan hubungan tidak langsung variabel X terhadap Y dengan Z sebagai variabel intervening.

1. Substruktur I (Pengaruh Langsung Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress*)



Gambar 3.2
Substruktur I : Pengaruh Langsung X terhadap Y

2. Substruktur I (Pengaruh Tidak Langsung Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* melalui Kemandirian Keuangan Daerah)



Gambar 3.2
Substruktur II : Pengaruh Tidak Langsung X terhadap Y melalui Z

Pengujian dengan analisis jalur dilakukan dengan menguji pengaruh Tingkat pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* dan Pengaruh Tingkat pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* melalui Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan substruktur diatas, menurut Barron dan Kenny (1986) dalam Muryawan dan Sukarsa (2016:449) untuk uji mediasi perlu mengestimasi tiga uji regresi yaitu:

- (1) Independen terhadap mediator;
- (2) Mediator terhadap dependen;
- (3) Independen terhadap dependen.

3.4.4.1 Pengujian Pengaruh Langsung

Pengujian pengaruh langsung dilihat dari nilai t hasil regresi pada tabel *coefficients* untuk dibandingkan dengan nilai t tabel. (Sarwono, 2011:290). Dalam hal ini, pengujian dilakukan untuk menguji pengaruh Tingkat pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress*.

3.4.4.2 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Uji Sobel)

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan istilah Uji Sobel (*Sobel Test*). Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. (Ghozali, 2018:244)

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji pengaruh tidak langsung menggunakan uji sobel adalah sebagai berikut :

1. Hitung *standard error* dari kofisien tidak langsung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Sab = \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2}$$

Keterangan :

a : koefisien jalur variabel independen (*exogen*)

b : koefisien jalur variabel mediator (*intervening*)

Sa : *standard error* variabel independen (*exogen*)

Sb : *standard error* variabel mediator (*intervening*)

Sab : *standard error* pengaruh tidak langsung (*indirect effect*)

2. Setelah melakukan perhitungan *standard error* koefisien *indirect effect*, selanjutnya dapat dihitung nilai *t* statistik dari koefisien pengaruh mediasi tersebut.

Adapun rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{Sab}$$

3. Setelah mengetahui nilai *t* statistik pengaruh mediasi, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai *t* hitung dengan *t* tabel.
 - a. Jika nilai *t* hitung lebih kecil dari *t* tabel, disimpulkan bahwa koefisien mediasi tidak signifikan, yang berarti tidak ada pengaruh mediasi atau *intervening*.
 - b. jika nilai *t* hitung lebih besar dari *t* table, makan koefisien mediasi signifikan, yang berarti terdapat pengaruh mediasi atau *intervening*.

3.4.5 Rancangan Pengujian Hipotesis

1. Penetapan Hipotesis Operasional

H01 : $\rho_{YX} = 0$: Tingkat Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*

Ha1 : $\rho_{YX} \neq 0$: Tingkat Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*

H02 : $\rho_{ZX} : \rho_{YZ} = 0$: Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memediasi pengaruh Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress*

Ha2 : $\rho_{ZX} : \rho_{YZ} \neq 0$: Kemandirian Keuangan Daerah mampu memediasi pengaruh Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress*

2. Penetapan Tingkat Signifikansi

Tingkat keyakinan dalam penelitian ini ditentukan sebesar 0,95 dengan tingkat kesalahan yang ditolelir atau α sebesar 0,05. Penentuan α sebesar 0,05 ini merujuk kelaziman yang digunakan secara umum dalam penelitian ilmu sosial yang dapat digunakan sebagai kriteria dalam pengujian signifikansi hipotesis penelitian. (Siregar, 2015:199)

3. Kaidah Keputusan

Adapun kaidah yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Langsung

Terima H0 : Jika $-t_{1/2 \alpha} \leq t \text{ hitung} \leq t_{1/2 \alpha}$

Tolak H0 : Jika $t \text{ hitung} < -t_{1/2 \alpha}$ atau $t \text{ hitung} > t_{1/2 \alpha}$

b. Pengaruh Tidak Langsung

Terima H0 : Jika $-t_{1/2 \alpha} \leq t \text{ hitung} \leq t_{1/2 \alpha}$

Tolak H0 : Jika $t \text{ hitung} < -t_{1/2 \alpha}$ atau $t \text{ hitung} > t_{1/2 \alpha}$

4. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis melakukan analisa secara kuantitatif dengan pengujian seperti pada tahapan diatas. Dari hasil tersebut akan ditarik kesimpulan mengenai hipotesis yang ditetapkan apakah diterima atau ditolak. Untuk kemudahan dan atas dasar ketepatan dan akurasi hasil perhitungan, maka penulis menggunakan program SPSS *statistic* versi 25